

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Pada tahun 2020 atau tahun kelima pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan kegiatannya memperhatikan kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang telah menetapkan tema pembangunan tahun 2020 adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Serta Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Mengurangi Kemiskinan.

Sejalan dengan amanat RPJMD tersebut, penjabaran isu isu strategis secara fokus telah tertuang dalam Renstra DPUPR dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase dan irigasi)
2. Memperbesar aksesibilitas wilayah
3. Manajemen lingkungan dan mempercepat cakupan dan kualitas sanitasi di kawasan pemukiman
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
5. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang bagi kawasan pemukiman

Selain itu, pada tahun 2020 dikembangkan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan misi pembangunan sebagai amanat RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran tentang Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM
2. Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
3. Penataan Administrasi Pertanahan terhadap lahan-lahan aset negara sebagai salah satu sumber daya pembangunan
4. Menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipatif dan berkeadilan.

I.2. Internal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Faktor internal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan anggaran

Sebagai dinas teknis yang out put utamanya adalah infrastruktur maka kemampuan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten merupakan salah satu faktor terpenting dalam pencapaian kinerja. Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan rekapitulasi perkembangan kegiatan belanja langsung mengelola anggaran langsung sebesar Rp 136.114.291.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Hal ini tentunya sangat mempengaruhi capaian kinerja DPUPR di tahun 2020 dan juga dapat berimplikasi pada capaian secara total dari Rencana Strategis DPUPR Tahun 2019-2021.

2. Kondisi Sumber Daya Manusia

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal diantaranya adalah peta SDM dan struktur organisasi yang ada. Data kepegawaian tahun 2020 terkait jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

a. Pegawai berdasarkan Distribusi Pada Unit-Unit Kerja

Tabel 1.1 Pegawai Berdasarkan Distribusi Pada Unit-Unit Kerja *)

Unit Kerja	JPT Pertama (Es.2B)	Administratur (Es.3A)	Administratur (Es. 3B)	Pengawas (Es.4A)	Pengawas (Es. 4B)	Pejabat Fungsional Ahli	Pejabat Fungsional Pertama	Staf PNS	Σ
Kepala Dinas	-								-
Sekretariat		1		2	-	-	-	22	25
Bidang Bina Program			1	2		-	-	2	5
Bidang Bina Marga			1	2		-	2	4	9
Bidang Sumber Daya Air			1	1		-	2	4	8
Bidang Penataan Ruang			1	2		-	-	3	6
Bidang Cipta Karya			1	2		-	-	10	13
UPTD Pengelolaan Alat Berat					1	-	-	1	2
UPTDLaboratorium Teknis					1	-	-	-	1
UPTD Wilayah Wonosobo				1	1	-	-	9	11
UPTD Wilayah Garung				-	1	-	-	6	7
UPTD Wilayah Sukoharjo				1	1	-	-	8	10
UPTD Wilayah Sapuran				1	-	-	-	6	7
UPTD Wilayah Kaliwiro				1	1	-	-	4	6
JUMLAH	-	1	5	15	6	-	4	79	110

*) Data Kepegawaian per Desember 2020

b. Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan *)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	Sarjana strata 2 (S2)	9	8,18
2	Sarjana strata 1 (S1)	19	17,27
3	Sarjana muda/diploma	18	16,36
4	SMA/SMK	41	37,27
5	SLTP	16	14,55
6	SD/MI	7	6,36
JUMLAH		110	100

*) Data Kepegawaian per Desember 2020

c. Pegawai PNS Berdasarkan Eselon

Tabel 1.3 Pegawai Berdasarkan Eselon *)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	Eselon 2B	-	-
2	Eselon 3A	1	0,91
3	Eselon 3B	5	4,55
4	Eselon 4A	15	15,45
5	Eselon 4B	4	3,64
6	Non Eselon	83	75,45
JUMLAH		110	100

*) Data Kepegawaian per Desember 2020

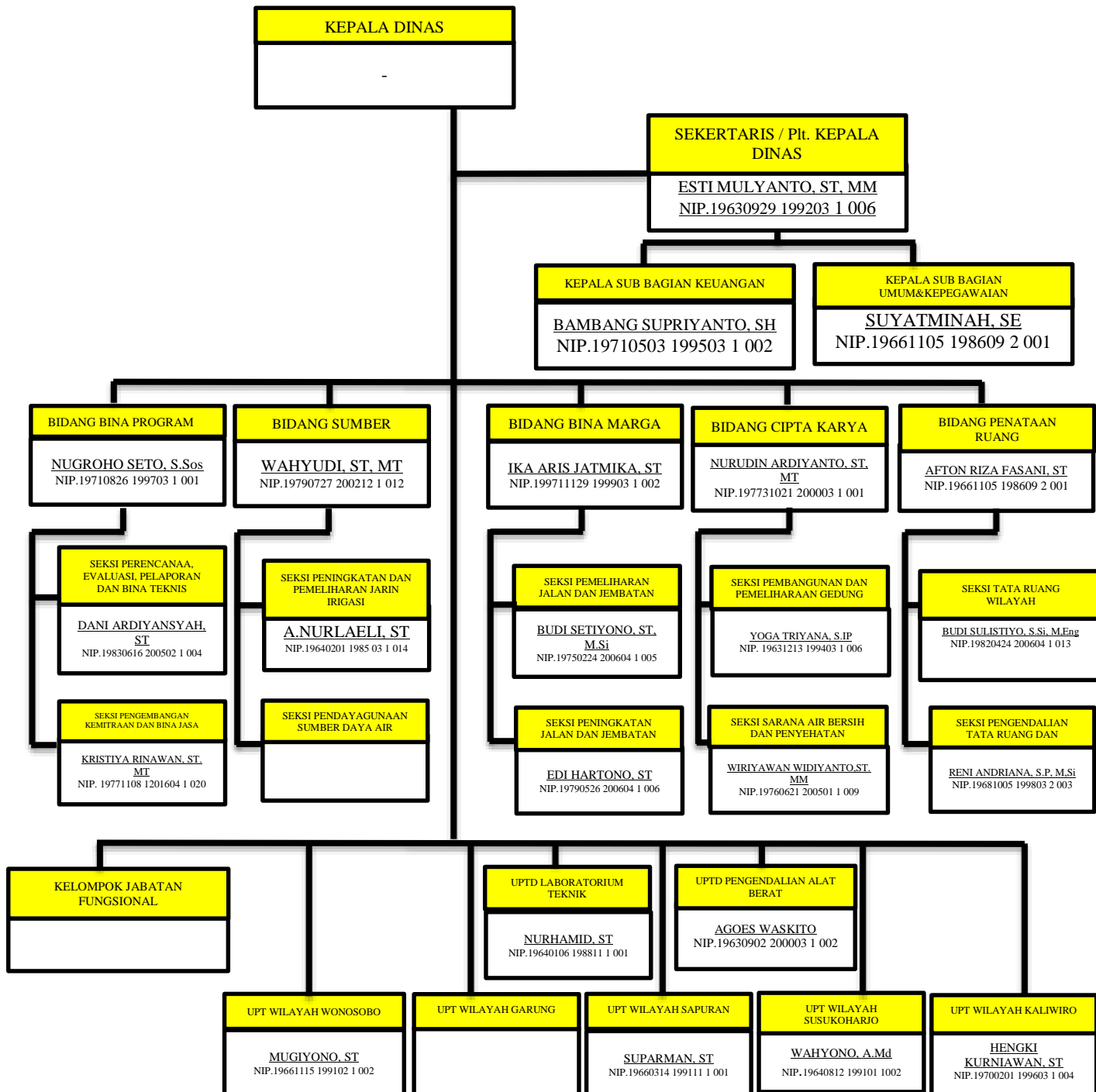
d. Pegawai PNS Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	Pembina Utama Muda / IVc	-	-
2	Pembina Tingkat 1/ IVb	1	0,91
3	Pembina / IVa	6	5,45
4	Penata Tk. 1 / IIIId	15	13,64
5	Penata / IIIc	4	3,64
6	Penata Muda Tk. 1 / IIIb	9	8,18
7	Penata Muda / IIIa	2	1,82
8	Pengatur / Tk. 1 / IIId	23	20,91
9	Pengatur / Iic	19	17,27
10	Pengatur Muda Tk. 1 / IIb	12	10,91
11	Pengatur Muda / IIa	1	0,91
12	Juru Tk. 1 / Id	15	13,64
13	Juru / Ic	2	1,82
14	Juru Muda Tk. 1 / Ib	1	0,91
JUMLAH		110	100

*) Data Kepegawaian per Desember 2020

Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta isian pejabatnya dapat dilihat sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, 2020

I.3. *Strategic Issued*

Permasalahan utama yang di hadapi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Dukungan SDM

Dari data pegawai yang sudah disampaikan di atas, tampak bahwa dukungan sumber daya manusia di Dinas PUPR baik secara kuantitas maupun kualitas masih kurang. Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan lanjut berupa diploma dan sarjana tidak lebih dari 42,2%. Prosentase tenaga teknis dibandingkan non teknis PNS di lingkungan DPUPR adalah 54%.

2. Kewenangan Yang Sangat Besar

Kewenangan yang dimiliki Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat besar. Untuk bidang jalan, sesuai surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 620/300/2016 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai jalan Kabupaten diatur mengenai jumlah ruas dan panjang jalan yang menjadi kewenangan yaitu 276 ruas dengan panjang 999,276 kilometer. Untuk irigasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/KPTS/M/2015 tahun 2015 menyatakan bahwa di Kabupaten Wonosobo, daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten adalah sebanyak 705 Daerah Irigasi (DI) dengan luas 21.050 Hektar.

Terkait target pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum, terdapat 2 SPM yang kesemuanya sangat sulit untuk dicapai jika melihat penanganan dan penganggaran saat ini. SPM tersebut adalah

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Sebagai salah satu layanan dasar, sampai dengan tahun 2020 capaian SPM ini adalah sebesar 91,68%

- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

Sebagai salah satu layanan dasar, sampai dengan tahun 2020 capaian SPM ini adalah sebesar 69,29%

Besarnya angka rencana capaian yang tidak sebanding dengan tren kemampuan pembiayaan daerah untuk sektor ini menjadi masalah mendasar sulitnya upaya pemenuhan SPM dalam jangka dekat.

3. Anggaran Yang Sangat Terbatas

Besarnya kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki seharusnya diimbangi dengan alokasi anggaran infrastruktur yang dikelola. Namun demikian, karena anggaran yang sangat terbatas maka alokasi yang diterima oleh DPUPR masih belum mampu menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana disampaikan diatas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dalam APBD Tahun 2020. Pada Tahun 2020, DPUPR melaksanakan 10 program yang diharapkan dapat melaksanakan 6 sasaran strategis sebagaimana amanat RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

Table 2.1 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan	Tingkat kemantapan jalan	68%
2	Meningkatnya cakupan layanan irigasi	Presentase jaringan irigasi kabupaten kondisi baik	71,06%
3	Meningkatnya cakupan layanan air minum	Presentase penduduk mendapatkan akses air minum layak	95,11%
4	Meningkatnya cakupan layanan akses sanitasi dasar	Presentase penduduk mendapatkan akses sanitasi	74,20%
5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	83,15%
6	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks kepuasan masyarakat	76
		Nilai evaluasi SAKIP dinas PUPR	BB

Untuk mewujudkan target kinerja yang sudah di tetapkan tersebut, Dinas PUPR sebagaimana tertuang Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 136.114.291.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk melaksanakan 12 program. Rincian anggaran perprogram dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2. Program Dan Anggaran Belanja Langsung Di Dinas PUPR
Sebagaimana Tertuang Dalam APBD Kab. Wonosobo TA 2020**

NO	PROGRAM	ANGGARAN PENETAPAN 2020
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 45.077.515.000
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Rp 900.000.000
3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 26.761.539.000
4	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Rp 535.064.003
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp 21.837.076.000
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp 43.587.286.150
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	Rp 509.519.600
8	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 674.919.500
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Rp 18.000.000
10	Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan	Rp 2.913.160.000
JUMLAH		Rp 142.814.079.253

Didalam Perjanjian Kinerja (KP) Perubahan Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, alokasi anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan urusan pekerjaan umum di Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo bertambah menjadi Rp 141.242.686.453 (Seratus Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Rupiah). Ada 12 program yang mengalami perubahan (bertambah / berkurang) alokasi anggaran. Rincian program dan alokasi anggaran per program sebagaimana tertuang dalam PK Perubahan 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3. Program Dan Anggaran Belanja Langsung Di Dinas PUPR Yang Mengalami Perubahan (Bertambah / Berkurang)

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN 2020
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 33.422.242.220
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Rp 860.602.325
3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 25.618.521.773
4	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Rp 519.600.303
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp 20.473.447.720
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp 40.056.444.134
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	Rp 488.867.085
8	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 533.634.000
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Rp 18.000.000
10	Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan	Rp 2.870.555.940
JUMLAH		Rp 124.342.315.197

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi diukur melalui hasil pengukuran kinerja organisasi pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja pada setiap sasaran strategis yang diamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan

Didalam sasaran strategis ini terdapat empat indikator kerja yaitu :

a. Tingkat Kemantapan jalan

Pada indikator ini, target kinerja yang harus dicapai sampai akhir tahun 2020 adalah 70%, dan capaian kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 57,68% hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut hanya terealisasi 82,40%

Apabila dikaitkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan tahun 2020 berada dibawah target jangka menengah yaitu sebesar 70%. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya akselerasi pada tahun berikutnya sehingga target akhir tahun perencanaan 2021 sebesar 75% dapat tercapai.

b. Presentase Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik

Pada indikator ini, target kinerja yang harus dicapai sampai akhir tahun 2020 adalah 74,18%, dan capaian kinerja pada tahun

2020 adalah sebesar 65,33% hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut hanya terealisasi 88,07%.

Apabila dikaitkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan tahun 2020, maka upaya penyediaan irigasi dalam kondisi baik melalui kegiatan peningkatan, rehabilitasi maupun pemeliharaan saluran irigasi perlu di akselerasi. Hal ini mengingat capaian kinerja tahun 2020 masih dibawah target kinerja perencanaan jangka menengah tahun 2020 yaitu 76,17% dari tahun 2021 sebesar 80%.

c. Presentase penduduk mendapatkan akses air minum layak

Pada indikator ini, target kinerja yang harus dicapai sampai akhir tahun 2020 adalah 97,56%, dan capaian kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 91,68% hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut hanya terealisasi 93,98%.

Apabila dikaitkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan tahun 2020 belum mencapai jangka menengah yaitu sebesar 97,56% Namun demikian perlu adanya upaya akselerasi pada tahun berikutnya sehingga target akhir tahun perencanaan 2021 sebesar 100% bisa tercapai.

d. Presentase penduduk mendapatkan akses sanitasi

Pada indikator ini, target kinerja yang harus dicapai sampai akhir tahun 2020 adalah 91,40%, dan capaian kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 69,26% hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut hanya terealisasi 75,78%.

Apabila dikaitkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan tahun 2020 belum melampaui target jangka menengah yaitu sebesar 91,40%. Namun demikian perlu adanya upaya akselerasi pada tahun berikutnya

sehingga target akhir tahun perencanaan 2021 sebesar 100% bisa tercapai.

e. Nilai Evaluasi SAKIP DPUPR

Pada indikator ini, capaian kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 73% hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian penilaian SAKIP DPUPR yang baik dengan nilai kategori dari B menjadi BB.

Capaian penilaian SAKIP ini masih lebih rendah dari capaian nilai rata rata kabupaten sebesar 71,05% untuk itu perlu peningkatan kapasitas penilaian SAKIP ditahun yang akan datang.

Tabel 3.1. Rincian realisasi kegiatan

NO.	Indikator Kinerja	Target	Capaian kinerja 2020	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat kemantapan jalan	70%	57,68%	82,40%
2	Presentase jaringan irigasi kabupaten kondisi baik	74,18%	65,33%	88,07%
3	Presentase penduduk mendapatkan akses air minum layak	97,56%	91,68%	93,98%
4	Presentase penduduk mendapatkan akses sanitasi	91,40%	69,26%	75,78%
5	Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	-	-	-
6	Indeks kepuasan masyarakat	76	-	-
	Nilai evaluasi SAKIP dinas PUPR	BB	BB	-

Sedangkan realisasi masing masing kegiatan dalam program dapat disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran per Kegiatan dalam Program

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	BELANJA LANGSUNG	142.814.079.253	124.342.315.197	87,07
1	Program pembangunan jalan dan jembatan	45.077.515.000	33.422.242.220	74,14
2	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	900.000.000	860.602.325	95,62
3	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	26.761.539.000	25.618.521.773	95,73
4	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	535.064.003	519.600.303	97,11
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	21.837.076.000	20.473.447.720	93,76
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	43.587.286.150	40.056.444.134	91,90
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	509.519.600	488.867.085	95,95
8	Program Perencanaan Tata Ruang	674.919.500	533.634.000	79,07
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	18.000.000	18.000.000	100,00
10	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	2.913.160.000	2.870.555.940	98,54

Catatan : Realisasi keuangan adalah data *unaudited*

Secara angka realisasi anggaran belanja langsung di Dinas PUPR tidak banyak berkembang dari realisasi tahun 2020 yaitu di angka 87,07% atau justru turun sebanyak 6,41%. Namun dari segi pelaksanaan kegiatan terdapat 48 (empat puluh delapan) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena double anggaran dan kegiatan bukan pada kewenangan kabupaten.

Sebagaimana sajian tabel diatas, hanya terdapat program yang memiliki capaian realisasi keuangan di bawah 75% yaitu :

- Program Pembangunan Jalan , dengan realisasi anggaran sebesar 74,14%.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo sepanjang tahun 2020 disandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 terlihat cukup optimal dan maksimal, hal ini tercermin dari realisasi anggaran sebesar 87,07%. Hal ini menunjukkan bahwa dinas telah mampu memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia dengan maksimal. Kegiatan yang tidak terealisasi didominasi pada prinsip ketaatan terhadap aturan pelaksanaan kegiatan yaitu terkait dengan kewenangan dan duplikasi anggaran yang rawan pelanggaran terhadap aturan pengadaan barang jasa.

Namun demikian beberapa catatan yang dapat dijadikan bekal bagi perbaikan kinerja kedepan antara lain :

1. Melanjutkan upaya memperkuat peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah
UPT Wilayah saat ini terus didorong untuk pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang menunjang tugas khususnya pemeliharaan jalan dan irigasi. Tahapan selanjutnya adalah perlunya peningkatan kelembagaan berupa peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM sebagai salah satu pilar keberhasilan organisasi.
2. Mendorong strategi baru dalam upaya akselerasi pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum. Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum disadari saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu strategi inovatif perlu untuk dikembangkan dengan sinergi dengan stakeholder potensial.
3. Mendorong upaya peningkatan kesepahaman terkait aturan – aturan pelaksanaan kegiatan. Salah satu permasalahan yang berhubungan dengan tingkat realisasi anggaran adalah masih terdapat banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Beberapa alasan yang jamak dijumpai

adalah kegiatan diluar kewenangan dan duplikasi anggaran. Untuk itu perlu duduk bersama eksekutif dan legislatif dalam forum yang mengkomunikasikan aturan aturan yang melingkupi proses pelaksanaan kegiatan yaitu aturan pengadaan barang/jasa, kewenangan kabupaten, aturan penanganan air minum, aturan tentang hibah, status jalan kabupaten dan status daerah irigasi kewenangan kabupaten. Pemahaman awal khususnya pada tahapan perencanaan akan mengurangi resiko duplikasi anggaran dan kegiatan kegiatan yang bukan kewenangan kabupaten.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ini disusun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO

ESTI MULYANTO, S.T, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19630929 199203 1 006